eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) : 333-343
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

STUDI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KELURAHAN SUNGAI SIRING SAMARINDA

Ayu Febrianty [1]

Abstrak

Ayu Febrianty, NIM.1002025148, Judul Skripsi ***"Studi Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kelurahan Sungai Siring Samarinda",*** *dibawah bimbingan Mohammad Taufik, S. Sos M. Si selaku pembimbing I dan Hj. E. Letizia Dyastari, S. Sos, M. Si selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.*

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu pertama dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung, kemudian dilakukan penyederhanaan data setelah itu penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa studi tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan daerah yang sedang berjalan di kelurahan Sungai Siring dalam pelaksanaan proses pendaftaran, sosialisasi bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai target, karena karena dalam pelaksaan kebijakan tersebut pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota, Jamkesda dan Kelurahan sungai Siring telah bekerjasama dengan baik dalam pendaftaran pesrerta, tetapi dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemberitahuan tentang jaminan sosial yang diakan oleh pemerintah, masyarakat masih banyak yang seakan tidak peduli karena merasa masih mampu untuk membayar biaya kesehatannya hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci **:** *pelayanan, jaminan kesehatan daerah*

Pendahuluan

Pemerintah menyadari bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang layak dan peningkatan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur, serta dengan adanya suatu jaminan sosial yang menyeluruh mengenai kesehatan masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nabiila.rahmad@gmail.com

pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal pelaksana pembangunan nasional yang hakikatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu usaha dari Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia ialah dengan mengeluarkan program yang bernama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program Jamkesda ini merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan.

Kalimantan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses kepesertaan Jamkesda tersebut. Berdasarkan masalah tersebut perlu ditindaklanjuti lebih fokus agar masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : Studi Tentang Kepesertaa Jaminan Kesehatan Daerah Di Kelurahan Sungai Siring Samarinda.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kepesertaan jamkesda di Kelurahan Sungai Siring. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepesertaan Jamkesda ke masyarakat khususnya Kelurahan Sungai Siring.

Kerangka Dasar Teori

Kepesertaan

Segala sesuatu pada saat program ini baru dimulai maka harus ada penentuan warga-warga atau masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan Jamkesda tersebut. Selain itu, juga dibahas bagaimana alur-alur prosedur pemberian kartu Jamkesda sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga tepat sasaran. Peserta yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat menjadi peserta Jamkesda dengan cara mendaftarkan diri pada penyelenggara Jamkesda, selain itu Jamkesda memberikan jaminan kesehatan dengan kepesertaan khusus kepada orang-orang yang dianggap berjasa, tokoh-tokoh agama dan janda/suami mantan Walikota dan Wakil Walikota yang belum memiliki jaminan kesehatan lain yang sesuai dengan Musyawarah Pimpinan Daerah dalam hal ini yaitu Walikota.

Pelayanan

Perusahaan sebagai sebuah lembaga bisnis yang mengejar keuntungan atas kegiatan yang dijalankannya harus pula memperhatikan pelayanan yang diberikan agar kepuasan pelanggan dapat tercapai.

Menurut Munir (1991:53) pelayan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini

pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara dan siap melayani masyarakat sesuai yang diharapkan yaitu lancar, aman dan nyaman.

Menurut Tulus (1992:23) yang didambakan masyarakat dalam pelayanan adalah :

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang-kadang dibuat-buat.
b. Pelayanan secara wajar, tanpa gerutu sendirian atau untain kata lain semacam yang nadanya mengarah pada permintaan tertentu baik untuk alasan dinas atau kesejahteraan.
c. Perlakuan pelayanan yang sama dalam kepentingan yang sama, tertib dan tak pandang bulu.
d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan kerena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti.

Menurut Agung Kurniawan, S. IP, M. Si (2005:4) hakekatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat dengan kata lain pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara.

Dari seluruh definisi di atas dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah tingkat kemampuan (ability) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

Jaminan Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Sejarah awal munculnya Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena jaminan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat meng-cover seluruh penduduk miskin yang tidak mampu untuk berobat. Lingkup Jamkesda adalah Kabupaten atau Provinsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Jamkesprov Kaltim) untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat Kaltim. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi masyarakat, khusunya masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat Provinsi Kaltim terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jamkesmas.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Samarinda merupakan upaya Pemkot untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dengan membantu meringankan biaya kesehatan yang mahal, karena dapat berimplikasi

pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang lain seperti belajar, bekerja, bersosialisasi dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Jamkesda

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin masyarakat dan anggota keluarga memperoleh jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Penyelenggaraan Jamkesda Kota Samarinda dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Kota Samarinda yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin pemeliharaan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan.

Manfaat dan Ruang lingkup jaminan Jamkesda dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara Jamkesda baik di dalam daerah maupun diluar daerah kota Samarinda. Manfaat dan ruang lingkup jaminan kesehatan bersifat pelayanan, jaminan yang tidak dijamin dalam pelayanan Jamkesda akan menjadi tanggung jawab peserta.

Tujuan Jamkesda adalah agar masyarakat mendapatkan jaminan apabila sakit dapat berobat ke pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Jika Jamkesmas sasarannya warga miskin, sedang Jamkesda lebih meluas, karena meliputi seluruh warga yang belum memiliki kartu jaminan atau asuransi kesehatan apapun. Peran Jamkesda melindungi masyarakat yang rentan miskin dan akan jatuh miskin bila sakit karena mahalnya biaya perobatan.

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka”. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk “Membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat akan fakta-fakta, sifat-sifat mengenai fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1999:64).

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian di lapangan. Dengan jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang sifatnya hanya memaparkan, menggambarkan dan menceritakan, maka penulis akan menggambarkan apa adanya dengan yang ada di lapangan yaitu mengenai " Studi Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kelurahan Sungai Siring Samarinda". Pengukuran yang pertama kali dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pihak Kelurahan dalam keikutsertaannya dalam proses pendaftaran/pelaksanaan kepesertaan yang ada di Kelurahan Sungai Siring. Penulis mengajukan pertanyaan kepada key informan terkait dalam narasumber mengenai proses kepesertaan Jamkesda di Kelurahan Sungai Siring Samarinda.

1. Proses pelayanan pendaftaran Kepesertaan

Proses pendaftaran peserta ialah tahapan-tahapan yang dilalui oleh peserta dalam pembuatan kartu Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Jamkesda yang bekerjasama dengan pihak Kelurahan, proses yang dilakukan agar tepat sasaran.

Kepesertaan adalah segala sesuatu pada saat program baru dimulai maka harus ada penentuan warga-warga atau masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu dibahas juga bagaimana alur-alur prosedur pemberian kartu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga dalam proses pemberian kartu dapat tepat pada sasarannya.

Syarat pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah ialah memiliki KTP dan KK Samarinda, mengisi kartu pendaftaran yang diberikan oleh pihak Jamkesda, tidak memiliki jaminan kesehatan lain yang disahkan oleh ketua RT dan Kelurahan. Pendaftaran kepesertaan dapat diurus sendiri dan dapat meminta bantuan oleh staf Kelurahan yang khusus bidang KESRA jika diperlukan mendadak.

Untuk menjadi peserta Jamkesda sebenarnya tidaklah sulit atau berbelit-belit karena pengurusan kartru Jamkesda dapat diurus secara mandiri agar masyarakat yang mengurus kepesertaan akan lebih paham dan mengerti prosedur yang berjalan, tetapi ada juga yang dibantu pembuatannya oleh staf Kelurahan yang khusus dibidang KESRA jika diperlukan mendadak. Calon peserta hanya perlu melampirkan foto copy KTP, KK, mengisi formulir pendaftaran Jamkesda, surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan lain yang ditanda tangani oleh RT.

Kesimpulan dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada beberapa Staf Kelurahan dan juga masyarakat pemakai kebijakan Jamkesda adalah proses pendaftaran kepesertaan sudah sangat baik dalam hal pelayanan, pihak Kelurahan juga sangat membantu masyarakat dalam hal pembuatan kartu Jamkesda jika masyarakat yang bersangkutan meminta pertolongan dalam hal pembuatan. Tetapi masih banyak masyarakat yang masih kurang mengetahui informasi tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

sehingga masih banyak masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu atau miskin yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan karena tidak mengetahui hal tersebut. Dikarenakan sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pihak Kelurahan maupun Jamkesda, sehingga masih banyak warga atau masyarakat yang tidak menggunakan kebijkan Pemerintah Daerah.

2. Ketepatan Sasaran

Kebijakan jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) pada dasaranya ditujukan kepada semua masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Samarinda yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Sasaran program Jamkesda ini mencakup seluruh warga kota Samarinda yang tidak memiliki Jaminan kesehatan apapun, sasaran Jamkesda ini sangat meluas tidak seperti Jamkesmas yang dikhusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi agar masyarakat tidak jatuh miskin atau rentan miskin dikarenakan pengobatan setiap tahunnya bertambah mahal. Dengan adanya program Jamkesda, maka akan sangat membantu masyarakat Samarinda dalam menekan angka kemiskinan dikarenakan biaya berobat sangat mahal. Masyarakat seharusnya memanfaatkan program pemerintah Daerah tersebut karena manfaat program tersebut sangat banyak, salah satunya membatu dalam pembiayaan kesehatan.

Akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa yang dapat memiliki atau yang berhak menjadi peserta ialah orang yang berekonomi lemah atau miskin dan yang masih merasa mampu akan memakai dana pribadi yang mereka miliki pada saat mereka melakukan kunjungan ke Rumah Sakit.

Berdasarkan uraian di atas secara kesuluruhan maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum memahami sasaran dari program jamkesda ini. Mereka menganggap bahwa jamkesda ini hanya untuk orang kurang mampu atau ekonomi lemah. Sehingga masyarakat yang merasa dirinya mampu tidak memanfaatkan program jamkesda ini dan berobat dengan mengeluarkan biaya pribadi mereka sendiri.

3. Administarsi Kepesertaan

Dalam administrasi kepesertaan Jamkesda melakukan registrasi kepesertaan. Akan tetapi, prosedur kepesertaan ini dianggap peserta Jamkesda terlalu rumit. Pada peserta Jamkesda dalam proses registrasi ini diminta untuk mendaftarkan kebagian administrasi dengan menyerahkan kartu Jamkesda asli, surat rujukan dari puskesmas, foto copy KTP dan KK Sebanyak 1 lembar kemudian untuk proses penerbitan dan pendistribusian harus dilakukan pemeriksaan berkas oleh petugas Jamkesda dan dikeluarkannya surat keabsahan peserta (SKP) kemudian peserta Jamkesda menerima pelayanan kesehatan.

Prosedur administrasi kepesertaan Jamkesda cukup panjang tetapi karena program Jamkesda ini merupakan program dari pemerintah, prosedur untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang rumit dapat juga dipenuhi oleh peserta Jamkesda yang merupakan masyarakat miskin.

Dapat diketahui bahwa dalam pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesda tidak ada pengecualian, maksudnya tidak ada yang dibedakan semua sama harus memenuhi persyaratan yang ada. Apabila satu atau lebih syarat yang ditentukan kurang maka peserta Jamkesda tidak akan mendapatkan pelayanan. Adapun persyaratan untuk mendapatkan pelayanan bagi peserta Jamkesda yang penulis amati pada saat observasi di lapangan yaitu :

1. Kartu Jamkesda
2. Foto copy KTP dan KK
3. Rujukan dari puskesmas setempat (Diagnosa harus jelas penuluisannya) administrasi kepesertaan tidak dipersulit. Akan tetapi masyarakat merasa sulit dikarena kurangnya info saat melakukan pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas maupun di Rumah Sakit. Karena kurang info tersebutlah yang membuat masyarakat pada saat melakukan pelayanan rawat jalan atau rawat inap sehingga terkadang berkas yang mereka bawa ada saja yang kurang lengkap sehingga tidak dapat dilayani oleh petugas Jamkesda. Dalam pandangan Sinambela (2006:8) kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan kompehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya.

4. Kepesertaan Khusus Berdasarkan MUSPIDA

Kepesertaan Khusus adalah kepesertaan yang memiliki kretria yang dikhususkan oleh pihak yang berwenang, yang berwenang di sini ditujukan kepada Pimpinan Daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati. Kepesertaan khusus yang dimaksudkan kepada orang-orang yang dianggap berjasa, tokoh-tokoh agama dan janda/suami mantan Walikota dan Wakil Walikota yang belum memiliki jaminan kesehatan lain, yang telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota. MUSPIDA itu sendiri ialah Musyawarah Pimpinan Daerah dalam hal ini Walikota beserta jajarannya.

MUSPIDA merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah untuk kemaslahatan orang-orang yang telah berjasa sehingga tidak melupakan pengabdian mereka terhadap Daerah ini. Dan dengan cara musyawarah ini juga maka kebijakan Jamkesda akan betul-betul dipertimbangkan ketika adanya hal-hal yang menghambat program Jamkesda tersebut.

5. Kendala-kendala yang terdapat pada pelaksanaan program Jamkesda

Suatu kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh munculnya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang datang dari dalam maupun maupun luar kebijakan tersebut. Kendala-kendala tersebut nantinya dapat mengganggu di dalam proses

kegiatan pelaksanaan kebijakan. Tidak berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam program Jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Kelurahan Sungai Siring Samarinda dan Jamkesda hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kepesertaan jamkesda ialah :

Kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan dalam mengenalkan suatu kebijakan yang baru kepada masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat berjalannya suatu program kebijakan. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Siring Samarinda dan Jamkesda penulis masih rasakan masih kurang, karena masih adanya warga yang belum paham benar akan sistem pendaftaran kepesertaan program jamkesda ini. Hal tersebut nantinya harus segera diatasi oleh pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Banyak dari warga Kelurahan Sungai Siring yang belum paham benar tentang program Jamkesda, secara umum warga mengetahui program Jamkesda adalah program yang menanggung biaya pengobatan (gratis) bagi warga yang menggunakan program Jamkesda di Kota Samarinda dan kebanyakan hal ini diketahui warga dari sosialisasi yang dilakukan Kelurahan Sungai Siring dan Jamkesda di lingkungan tempat tinggal masing-masing warga. Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui kalau program Jamkesda ini tidak secara menyeluruh menanggung biaya kesehatan terhadap penyakit/keluhan yan diderita warga, sehingga adanya pembatasan tersebut dapat manjadi pengahambat sekaligus kekurangan dari program Jamkesda. Dan juga warga berpikir bahwa Jamkesda merupakan program yang tidak semua menyentuh kalangan sehingga warga yang merasa masih sanggup melakukan pembiayaan akan menggunakan dana pribadi, sehingga jika mereka dalam kondisi memiliki penyakit kronis seperti setiap minggu harus melakukan cuci darah itu akan membuat keadaan finansial mereka akan turun drastis dan rentan miskin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Samarinda, maka penulis mengambil kesimpulan terhadap Studi tentang kepesertaan Jamkesda di Kelurahan Sungai Siring Samarinda berjalan kurang baik dan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa poin yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Jamkesda telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai pemberi jaminan kesehatan bagi peserta jamkesda, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur pembuatan kartu Jamkesda ini. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak melengkapi persyaratan juga meminta pelayanan yang tidak termasuk dalam prosedur Jamkesda. Sehingga peserta Jamkesda tidak diberikan jaminan

kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan Rumah sakit. Hal ini sering sekali menimbulkan permasalahan dalam pembuatan kartu Jamkesda.

2. Ketepatan sasaran di Kelurahan Sungai Siring sudah sesuai dengan standar atau syarat yang telah ditentukan oleh UPTD Jamkesda yaitu warga Samarinda dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan lain. Karena peserta Jamkesda didata oleh ketua RT setempat sehingga untuk terjadinya kesalahan sangat kecil pada saat mendaftar ke kantor Jamkesda. Setiap ketua RT yang ada di Kelurahan Sungai Siring telah diberikan pengarahan agar warga yang didata betul-betul orang yang membutuhkan Jamkesda tersebut.
3. Kepesertaan yang berdasarkan MUSPIDA merupakan orang-orang yang dianggap berjasa yang telah mengabdikan diri terhadap Kota Samarinda dari musyawarah yang dilakukan oleh pemimpin Daerah yang terkait kepesertaan Jamkesda yaitu orang-orang yang berjasa, tokoh-tokoh agama dan janda/suami mantan Walikota dan Wakil Walikota yang belum memiliki jaminan kesehatan lain. Tetapi dalam hal ini di Kelurahan Sungai Siring tidak terdapat orang-orang yang termasuk dalam kreteria yang telah ditetapkan oleh keputusan MUSPIDA.
4. Kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan dalam mengenalkan suatu kebijakan yang baru kepada masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat berjalannya suatu program kebijakan. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Siring Samarinda dan Jamkesda penulis masih rasakan masih kurang, karena masih adanya warga yang belum paham benar akan sistem pendaftaran kepesertaan program jamkesda ini. Hal tersebut nantinya harus segera diatasi oleh pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
5. Banyak dari warga Kelurahan Sungai Siring yang belum paham benar tentang program Jamkesda, secara umum warga mengetahui program Jamkesda adalah program yang menanggung biaya pengobatan (gratis) bagi warga yang menggunakan program Jamkesda di Kota Samarinda dan kebanyakan hal ini diketahui warga dari sosialisasi yang dilakukan Kelurahan Sungai Siring dan Jamkesda di lingkungan tempat tinggal masing-masing warga

Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sungai Siring Samarinda mengenai jaminan kesehatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan telah berjalan baik. Namun pada dasarnya masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga kedepannya program Jamkesda ini dapat mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran yang berdasarkan hasil temuan dilapangan, untuk pihak Kelurahan Sungai Siring itu sendiri, yaitu :

1. Tenaga staf yang memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Daya tanggap yang cepat apabila dibutuhkan oleh peserta serta

sikap ramah dalam memberikan pelayanan. Serta tidak membedakan pelayanan terhadap peserta, baik peserta yang dikenal maupun tidak. Perlu adanya pembinaan tehadap para Staf, agar dapat memberikan pelayan yang baik.

2. Sarana dan prasarana perlu ditambah lagi demi menunjang pelayanan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat, seperti Komputer, ruang tunggu yang lebih luas agar dalam proses pelayanan yang berlangsung tidak perlu menunggu di luar. Pihak Kelurahan perlu mengajukan kepada pemerintah untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan terbaik.

Sedangkan saran-saran untuk Jamkesda mengenai kepesertaan Jamkesda yaitu :

1. Perlu ditambahkannya jadwal sosialisasi lagi tehadap Kelurahan Sungai Siring mengenai jamkesda baik dari prosedur pendaftaran, apa saja yang ditanggung, aturan mengenai jamkesda dan hal lainnya mengenai jamkesda. Sehingga masyarakat lebih mengerti mengenai jamkesda dan lebih antusias terhadap program PEMDA tersebut. Dan dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.
2. Ditambahnya papan alur tentang proses pendaftaran kepesertaan yang lengkap sehingga peserta yang memiliki pendidikan rendah lebih mudah memahami proses tersebut tanpa perlu bertanya lagi. Serta ruang tunggu yang sempit untuk lebih diluaskan, untuk menunjang pelayanan yang prima sehingga calon peserta Jamkesda tidak harus berdesak-desakan pada saat proses sedang berjalan. Perlu adanya microphone agar dalam pemanggilan peserta dapat mendengar dengan jelas pada saat suasana dalam keadaan ramai, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Daftar Pustaka

Azwar, Azrul, 1996, Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Bermutu, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.

Brataatmaja, Karida Heru, 1994, Kamus Bahasa Indonesia, Kanisius Jakarta.

Koenjatraningrat, 1991, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.

Laksana, Harimurti Krida, 1994, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, Jakarta: Nusa Indah.

Lumeta, Benyamin, 1989, Pelayanan Medis Cetakan I, Kanisius, Yogyakarta.

Miles, B. Matthew & Huberman. Michael. A, 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Moenir, A. S, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, J, Lexy, 2004, Metodelogi penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rasdakarya.

Nabuko, Achmadi, 2001, Informasi Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Pohan, S. Imbalu, 2003, Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar-dasar Pengertian, Kesnint Blanc, Bekasi.
Prof. Dr. Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta.
Singarimbuan, 1997, Metode Pemanfaatan Informan, Rhineka Cipta, Jakarta.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Dokumen-Dokumen :
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Samarinda.

Sumber Internet :
http://jamkesda-samarinda.info/2014/03/06/kepesertaan-jamkesda-samarinda/
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090519224310AAOHsZT
http://www.dinkeskotasamarinda.com/?p=740
http://www.dinkeskotasamarinda.com/?p=771